

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : P2 Produksi Film Negara

Nama Skema : *Key Gaffer*

Jenis Skema : Okupasi

Diverifikasi Tanggal : 14 Januari 2026

Verifikator



Eddy Siswanto

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua  
Sebagai Penanggung Jawab




Ulfah Mashfufah

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KEY GAFFER

Skema sertifikasi Key Gaffer adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P2 Produksi Film Negara untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P2 Produksi Film Negara. Kemasam kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Casting Film, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas bidang Tata Cahaya Film, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Grip dan Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0497/F6/KB/2020 Tentang Penetapan Peta Okupasi Nasional dan Pengemasan Skema Unit Kompetensi Bidang Perfilman. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P2 Produksi Film Negara dan memastikan kompetensi pada jabatan Key Gaffer.

Disahkan tanggal : 8 Januari 2026  
Oleh :



**Suranta Brahmata**  
Ketua LSP P2 PFN  
(Produksi Film Negara)



**Ali Soemawilaga**  
Ketua Komite Skema LSP P2 PFN  
(Produksi Film Negara)

Nomor Dokumen : SKM.05/LSPPFN/2026  
Nomor Salinan : 0  
Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Bidang Tata Cahaya Film.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Bidang Tata Cahaya Film yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Tata Cahaya Film.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Tata Cahaya Film.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Key Gaffer.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Key Gaffer
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Casting Film.
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan

Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas bidang Tata Cahaya Film.

- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi, Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas Bidang Grip.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.13. Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 0497/F6/KB/2020 Tentang Penetapan Peta Okupasi Nasional Dan Pengemasan Skema Unit Kompetensi Bidang Perfilman.

## **5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**

5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / Klaster

5.2 Nama Skema : Key Gaffer

Rincian Unit Kompetensi :

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT KOMPETENSI</b>
1.	R.90CAM00.001.1	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
2.	R.90CAM00.002.1	Menerapkan Etika, Tata Krama, Dan Tanggung Jawab Profesi
3.	R.90PRO00.001.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak untuk Manajemen Produksi
4.	R.90CAS00.004.1	Menyusun Dokumen, Laporan dan Lembaran kerja
5.	R.90GRP00.001.1	Menganalisis Konsep Visual Pengarah Sinematografi
6.	R.90GAF00.001.1	Menerapkan Konsep Tata Cahaya Berdasarkan Floor Plan
7.	R.90GAF00.002.1	Membuat Perencanaan Pelaksanaan Tata Cahaya
8.	R.90GAF00.003.1	Merancang Teknik Tata Cahaya
9.	R.90GAF00.004.1	Melakukan Pendataan Perangkat Tata Cahaya

## **6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

- 6.1. Karyawan PT PFN/karyawan mitra/jejaring kerja PT PFN yang memiliki pengalaman kerja pada jabatan Key Gaffer minimal 2 (dua) tahun, atau pernah terlibat dalam minimal 2 (dua) proyek produksi film panjang, atau;
- 6.2. Telah lulus pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Key Gaffer di Indonesia Film & Content Academy (IFCA) PT Produksi Film Negara (Persero).

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

#### **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

### **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya sertifikasi pada Skema Sertifikasi Okupasi Key Gaffer ditetapkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Besaran biaya sertifikasi dapat disesuaikan untuk pelaksanaan sertifikasi secara kolektif di perusahaan, instansi pemerintah, mitra/partner, ekosistem PFN, atau lembaga pendidikan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama.

### **9. PROSES SERTIFIKASI**

#### **9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy ID Card Karyawan PT PFN/karyawan mitra/jejaring kerja PT PFN dan Copy surat keterangan pengalaman kerja pada jabatan Key Gaffer minimal 2 tahun atau pernah terlibat dalam minimal 2 (dua) proyek produksi film panjang, atau
  - b. Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Key Gaffer di Indonesia Film & Content Academy (IFCA) PT Produksi Film Negara.
  - c. Copy KTP;
  - d. Pas foto 3x4 latar belakang merah 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

#### **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikasi melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

#### **9.6. Surveilan pemegang sertifikat/Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP.

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

#### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.